

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana

ISSN 1411 - 9005

Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan

**Penghayatan Agama
di Ruang Publik yang Plural**



Editor :

Dr. Alphonsus Tjatur Raharso

Dr. Paulinus Yan Olla

Dr. Yustinus

Vol. 27 Seri No. 26, 2017

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana
ISSN 1411 - 9005

**Mengabdi Tuhan dan
Mencintai *Liyan*:
Penghayatan Agama
Di Ruang Publik yang Plural**

Editor:
Dr. A. Tjatur Raharso
Dr. Paulinus Yan Olla
Dr. Yustinus

STFT Widya Sasana
Malang 2017

Mengabdikan Tuhan dan Mencintai *Liyan*: ***Penghayatan Agama Di Ruang Publik yang Plural***

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

E-mail: stftws@gmail.com

Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

Cetakan ke-1: Oktober 2017

ISSN: 1411-9005

DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA
VOL. 27, NO. SERI NO. 26, TAHUN 2017

Pengantar	
<i>Tim Editor</i>	i
Daftar Isi	v

BAGIAN 1: MENGAMATI REALITA

Merawat Kebinekaan, Membumikan Pancasila	
<i>Halili Hasan, MA</i>	3
Wajah Agama yang Beringas Di Ruang Publik	
<i>Peter Bruno Sarbini</i>	26
Beragama Di Indonesia	
<i>Petrus Go Twan An</i>	38
Agama dan Negara Dalam Masyarakat Plural Indonesia	
<i>Paulinus Yan Olla</i>	44

BAGIAN II: ANALISIS DAN REFLEKSI FILSAFAT SOSIAL

Aku Indonesia, Aku Pancasila	
Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	59
Asal Usul Liyan	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	71
Gerakan-gerakan Pencerahan Indonesia	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	90

Agama Dalam Ruang Publik Di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik - Satu Telaah Filsafat Sosial <i>Donatus Sermada Kelen</i>	108
Pancasila Di Ruang Keseharian <i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	133
Revitalisasi Pancasila Demi Indonesia yang Religius dan Beradab <i>Valentinus Saeng</i>	158

BAGIAN III: INSPIRASI IMAN KRISTIANI

Janganlah Kamu Melawan <i>Berthold Anton Pareira</i>	189
Jangan Takut <i>Berthold Anton Pareira</i>	204
Misteri Salib Tuhan <i>Berthold Anton Pareira</i>	215
Surat Pak Ahok dari Rumah Tahanan Depok <i>Berthold Anton Pareira</i>	227
Proselit - Penistaan - Perburuan Sikap Kaisar Terhadap Kristiani Sampai dengan 313 <i>Edison R.L. Tinambunan</i>	235
Relevansi Doktrin Trinitas Bagi Kehidupan Bermasyarakat <i>Gregorius Pasi</i>	252
Kehadiran Gereja Di Ruang Publik <i>Antonius Denny Firmanto</i>	272
Jelajah Mengatasi Parokialisme <i>Raymundus I Made Sudhiarsa</i>	286
Menakar Peran Agama Di Tengah Merebaknya Patologi Ruang Publik <i>Pius Pandor</i>	303

AGAMA DAN NEGARA DALAM MASYARAKAT PLURAL INDONESIA

Paulinus Yan Olla

Pendahuluan

Keterlibatan agama di ruang publik, secara khusus di bidang politik, semakin hari semakin menjadi bahan perbincangan yang menarik perhatian publik. Di satu pihak diakui adanya sumbangan agama-agama bagi kohesi sosial suatu masyarakat, tetapi di pihak lain ada pula gejolak, ketegangan dan keterpecahan dalam masyarakat karena penggunaan isu-isu keagamaan untuk perebutan kekuasaan.¹

Tulisan ini ingin pertama-tama menggambarkan secara garis besar tempat agama dalam masyarakat plural, modern dan rasional-sekularistis. Suatu situasi di mana di satu pihak ada ketegangan atau keraguan misalnya di Eropa tentang peran agama di ruang publik. Di pihak lain masyarakat yang sekular tersebut kehilangan daya rohani untuk mengontrol perkembangannya sendiri. Dalam konteks demikian apakah agama dapat memberi sumbangan positif bagi suatu masyarakat plural dan sekular-rasionalistis?

Pertanyaan lain yang ingin dihadapi adalah: bagaimana relasi yang seharusnya ada antara negara dan pluralitas agama dalam suatu masyarakat majemuk seperti Indonesia? Pada bagian ini kebijakan politik negara terhadap agama-agama disoroti. Dalam kerangka itu diperlihatkan pula berbagai alasan mengapa Gereja Katolik perlu terlibat dalam politik dan ikut menghargai keanekaragaman agama, etnisitas dan budaya yang dimiliki bangsa ini.

1 Bandingkan bagaimana telah terjadinya polarisasi dalam masyarakat setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta, seperti secara masif diliput di media massa dan media sosial. Masyarakat tercabik, terluka dan kesatuan bangsa rawan terkoyak karena agama “dipolitikkan” sampai menimbulkan luka dalam masyarakat (bdk., Halili, “Mengobati Luka Demokrasi”, *Kompas*, (20 Mei 2017), hal., 7.

Akhirnya diharapkan pula adanya suatu kiblat politik orang Katolik di Indonesia. Apa sumbangan utama Gereja Katolik dalam keterlibatan politiknya. Tujuan keterlibatan politik Gereja digambarkan sebagai usaha untuk menyumbang bagi kesejahteraan umum.

Sejarah panjang keterlibatan agama Kristiani memperlihatkan adanya ketegangan di atas. Ada masa di mana agama Kristiani menjadi kelompok yang dikejar-kejar dan teraniaya ketika ia dianggap sebagai sebuah “sekte Yahudi” dalam Kekaisaran Romawi. Tetapi ketika agama Kristiani menjadi “agama negara” dalam imperium/kekaisaran yang sama maka agama sering dicampurbaurkan menjadi sarana perebutan dan legitimasi kekuasaan.²

1. Tempat Agama Dalam Masyarakat Sekular-Plural Modern

Salah satu diskusi hangat yang kembali mengisi ruang publik setelah serangkaian serangan teroris bermotif agama, misalnya setelah peristiwa serangan 11 September 2001 di New York City adalah mempersoalkan tempat agama di ruang publik. Dipertanyakan tempat agama dalam masyarakat modern yang plural-sekular. Jika diakui adanya peran agama maka dipertanyakan pula bagaimana mencegah penyalahgunaan agama agar tidak dijadikan motif bagi tindak kekerasan dan teror.

Diskusi itu antara lain misalnya, antara J. Habermas dan Kardinal J. Ratzinger (kemudian Paus Benediktus XVI), yang berkisar peran agama dalam diskursus politik di masa “postmetafisis.” Pertanyaan yang dihadapi adalah: adakah tempat bagi agama dalam penyelenggaraan hidup bersama (baca: negara) dalam suatu masyarakat pluralistik? Apakah rasionalitas agama masih dapat dirujuk dalam suatu sistem politik liberal-sekular yang menuntut kekuasaan politik bersikap netral terhadap semua pandangan hidup?³

2 Argumen di atas secara panjang lebar diuraikan dalam karya kami, Paulinus Yan Olla, *Spiritualitas Politik, Kesucian Politik Dalam Perspektif Kristiani* (Jakarta: Gramedia, 2014), hal., 95-104.

3 Lihat, Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (eds.), *Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan* (Lamalera dan Ledalero, 2010). Teks diskusi kedua tokoh terdapat pada hal., 1-56.

Dalam konteks negara sekular, Habermas mengusulkan agar para warga beriman dan yang “sekular” harus berusaha untuk saling bergaul. Tuntutan untuk memonopoli interpretasi dan melakukan penataan hidup yang menyeluruh harus dilepaskan oleh agama dalam kondisi sekularisasi pengetahuan, netralisasi kekuasaan negara dan kebebasan beragama yang diperluas. Di pihak lain menurut Habermas, dalam iklim toleransi, “kesadaran sekular” juga harus membayar untuk dapat menikmati kebebasan untuk tidak beragama. Warga negara yang menamakan diri “sekular” atau tidak beriman tidak boleh begitu saja menolak kemungkinan kebenaran yang terkandung dalam pandangan-pandangan hidup yang bersifat religius. Mereka tidak perlu mempersoalkan kontribusi warga beriman dalam diskusi-diskusi publik dalam bahasa religius.

Dalam kaitannya dengan peran negara, Habermas menegaskan bahwa netralitas kekuasaan negara terhadap berbagai pandangan hidup menjamin kebebasan etis yang sama bagi semua warga. Satu kultur politis yang liberal harusnya dapat mengharapkan kontribusi dari semua warganya. Kontribusi dari kelompok religius bagi negara harusnya dapat dibahasakan ke dalam bahasa publik yang dapat dipahami semua orang.⁴

Kardinal Ratzinger setuju dengan Habermas tentang masyarakat postsekular dan mengenai kesediaan untuk saling belajar. Ada dua hal yang ditegaskannya. Pertama, perlunya melihat adanya “patologi-patologi” dalam agama maupun dalam akal budi. Agama memerlukan cahaya ilahi akal budi sebagai sarana kontrol. Bercermin pada cahaya akal budi itu agama harus terus-menerus membersihkan dan menata diri. Begitu juga akal budi perlu menyembuhkan diri dari patologinya, yakni keangkuhannya yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan, seperti terjadi dengan penggunaan bom atom dan manusia sebagai produk teknologi. Diperlukan adanya suatu korelasi antara akal budi dan iman maupun antara akal budi dan agama. Keduanya dipanggil untuk saling menyembuhkan dan menjernihkan.

Kedua, korelasi antara akal budi dan agama-agama itu harus diwujudkan dalam konteks interkultural di masa kini. Iman Kristiani dan

4 Lihat, Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (eds.), *Dialektika Sekularisasi*, hal., 25-27.

rasionalitas Barat tidak boleh menjadi arogan dan terjebak dalam eurosentrisme tetapi perlu “mendengar” dan bersedia berkorelasi dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Komplementaritas antara akal dan iman akan membantu proses tumbuhnya penjernihan universal di mana nilai-nilai dan norma-norma utama yang dikenal atau dipikirkan oleh semua manusia menemukan sinar pancarannya yang baru.⁵

Di Tanah Air diskusi tentang tempat agama terus menyita perhatian publik sampai saat ini. Inisiatif pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, merupakan salah satu contohnya. Walaupun inisiatif itu dinilai kontroversial, pemerintah tampak berusaha meletakkan agama-agama dan organisasi masyarakat lainnya dalam kerangka sebuah negara kesatuan yang plural masyarakatnya.⁶ Uraian pada bagian berikut akan memperdalam isu tersebut.

2. Relasi Negara dan Agama-Agama Dalam Masyarakat Plural Indonesia

Jauh sebelum kemerdekaannya, Indonesia mengakui diri sebagai bangsa yang plural. Pluralitas multidimensional itu dibingkai oleh kesadaran akan kesamaan nasib sebagai bangsa tertindas dan hal itu semakin lama semakin melahirkan benih-benih kesadaran nasional untuk menjadi sebuah negara-bangsa. Sumpah Pemuda tahun 1928 misalnya merupakan salah satu hasil proses kesadaran nasional. Di kemudian hari ketika memikirkan dasar bersama bagi negara yang akan lahir, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” digunakan merangkum realitas keberagaman dan cita-cita kesatuan negara-bangsa Indonesia.

5 Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (eds.), *Dialektika Sekularisasi*, hal., 52-55.

6 Kontroversi yang kemudian muncul misalnya menyangkut hak warga negara untuk berorganisasi tidak dapat menafikan maksud dasar keinginan negara untuk menempatkan agama-agama dalam proses mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan kehidupan bersama sebagai satu negara bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan perekat kesatuan bangsa ditegaskan kembali kedudukannya.

Keragaman Indonesia adalah sesuatu yang sungguh nyata. Negeri ini memiliki 483 etnik dan 719 bahasa. Profesor Herawati Sudoyo, ahli genetika dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman misalnya, memaparkan bahwa ada empat gelombang migrasi leluhur manusia Indonesia. Gelombang pertama bermigrasi dari Afrika dan tiba di Papua sekitar 50.000 tahun yang lalu. Gelombang kedua sekitar 11.000-6.000 tahun lalu di akhir Zaman Es. Mereka berasal dari Afrika tetapi lama menetap di daratan Asia sebelum masuk ke Indonesia. Gelombang ketiga adalah datangnya penutur Austronesia dari Taiwan yang terjadi sekitar 4.000-5.000 tahun lalu dan ditemui hampir di semua etnis di Indonesia dari timur sampai ke barat. Akhirnya migrasi tahap keempat terjadi di era sejarah seiring intensifnya perdagangan antarbenua. Dari jalur barat datang pelaut-pelaut Arab, India, Eropa dan dari timur datang pelaut Tiongkok.

Ada catatan khusus dari Herawati tentang gelombang keempat dalam migrasi. Kendati pengaruh gelombang keempat sangat sedikit sumbangannya bagi genetika manusia Indonesia, ia sebenarnya yang paling mempertajam perbedaan identitas, terutama dengan dibawanya agama-agama baru. Dari India datang Hindu, Budha, dari Arab Agama Islam, dari Eropa Kristen dan Katolik. Agama-agama baru itu kemudian bertemu dengan kepercayaan lokal yang ribuan tahun telah berkembang di Indonesia.⁷

Setelah kemerdekaan, perdebatan, konsensus dan usaha terus-menerus menemukan tempat agama dalam konteks Indonesia tidak mudah. Inti perdebatannya bukan antara kelompok sekular dan kelompok keagamaan seperti dibahas pada awal tulisan ini, tetapi pada soal relasi antara negara dan agama-agama dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Relasi negara dan agama-agama yang dipengaruhi oleh fakta pluralitas multidimensional tersebut diwarnai usaha di satu pihak agama-agama terutama agama mayoritas untuk menemukan peran publiknya dan di pihak lain usaha pemerintah untuk merangkul semua agama dalam kerangka satu

7 Uraian Herawati Sudoyo disampaikan pada para guru peserta “Sekolah Guru Kebhinekaan” yang diadakan oleh Yayasan Cahaya Guru, 8 Juli 2017. Lihat, Ahmat Arif, “Mengenali Diri, Menghargai Kebinekaan,” dalam *Kompas* (16 Juli 2017), hal. 5.

negara kesatuan yang demokratis. Dalam kenyataannya disfungsi agama akan hadir ketika pelembagaan agama diikuti oleh kepentingan di luar dirinya, ketika tafsir telah menjadi sebuah kemutlakan, ketika keyakinan kemutlakan terhadap agama telah mengharuskan dan menafikan kebenaran agama lain. Instrumentalisasi agama mudah terjadi ketika agama telah dilembagakan dalam bentuk partai politik dan campur tangan negara dalam bentuk kebijakan publik.

Relasi negara dan agama-agama sangat ditentukan oleh keadaan ketika negara sudah melibatkan diri dalam urusan agama dalam bentuk kebijakan publik. Melalui kebijakan-kebijakan negara, soal-soal agama tidak lagi hanya menjadi urusan pribadi, tetapi telah berubah menjadi urusan publik. Dalam konteks tersebut perlu dihindari adanya politisasi agama lewat birokratisasi negara yang tampil dalam bentuk kebijakan.⁸

Ketegangan agama-agama, terutama antara negara dan agama Islam sekitar Piagam Jakarta masih meninggalkan jejak sampai hari ini. Alasan pertama ketegangan itu adalah anggapan sosiologis bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Islam, maka wajar jika hukum agama Islam menjadi hukum positif negara, sekurang-kurangnya bagi para pemeluknya. Asumsi ini secara sosiologis dianggap mengabaikan realitas sosial tentang pluralitas agama di Indonesia. Dalam realitas pluralitas agama, negara perlu bebas dari kalkulasi agama tertentu dan perlu menjamin minoritas secara konstitusional.

Alasan kedua berkaitan dengan penafsiran doktrinal. Ada keyakinan kuat bahwa agama Islam merupakan agama yang holistik, yang mengatur seluruh kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam kehidupan bernegara. Penerapan agama sebagai hukum negara dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya dan menjadi kewajiban bagi para pemeluknya untuk memperjuangkannya. Asumsi yang demikian juga ditolak karena mengabaikan adanya pandangan lain tentang tidak adanya cetak biru dalam agama Islam. Al Quran dianggap hanya memuat prinsip-prinsip umum dan

8 Anas Saidi (ed.), *Menekuk Agama, Membangun Tahta* (Jakarta: Desantara Utama, 2004), hal., 2.

tidak memiliki cetak biru tentang bagaimana harus diatur menurut prinsip-prinsip agama.⁹

Menghadapi ketegangan tersebut, berbagai rezim pemerintahan di negeri ini telah berusaha menata kehidupan beragama. Pada rezim orde lama, konflik penataan agama lebih bersifat ideologis. Penghapusan “tujuh kata” dari Pancasila diterima tidak saja karena penolakan dari kelompok non-Muslim dan nasionalis, tetapi juga karena realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Lebih dalam dari itu Bung Karno sendiri mempunyai pertimbangan ideologis. Dengan menambah dalam sila pertama yang semula hanya berbunyi “Kepercayaan kepada Tuhan” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” ada upaya mendekatkan Pancasila dengan prinsip ketauhidan Islam. Namun bagi Sukarno pilihan politis untuk tidak melembagakan agama (*religious disestablishment*) akan memberi ruang bagi agama untuk merealisasikan diri secara lebih efektif.

Kebijakan keagamaan era Soeharto tidak memperlihatkan konsistensi dan komitmen yang jelas. Komitmen yang semu terhadap Pancasila yang memuat ideologi toleransi dan pengakuan terhadap pluralitas yang memberi ruang terhadap etnoreligius sering hanya merupakan usaha untuk mengelabui dan melanggengkan kekuasaannya. Pancasila lebih dijadikan sebagai instrumen untuk memelihara kekuasaan.¹⁰

Di masa reformasi, setelah kejatuhan Soeharto, sampai kini ketegangan dalam Islam untuk merumuskan relasi antara agama dan negara terus berlangsung. Islam politik atau aliran formalistik yang menganut konsep bersatunya agama dan negara (integralistik) tetap ada. Ide Khilafah yang kini marak diperbincangkan merupakan bentuk pemikiran kontemporer aliran ini. Sedangkan aliran Islam kultural yang lebih menekankan semangat kesalehan tanpa membutuhkan afiliasi partai politik merujuk pada kenyataan bahwa Al Quran sama sekali tidak perlu menyebut perlunya negara Islam. Moh. Mahfud lebih jauh menegaskan bahwa “di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada sistem politik,

9 Anas Saidi (ed.), *Menekuk Agama*, hal., 11-12.

10 Anas Saidi (ed.), *Menekuk Agama*, hal., 14-17.

ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku.... Umat Islam Indonesia boleh mempunyai sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia sendiri.”¹¹

Akhirnya dalam pembahasan soal kaitan antara negara dan agama-agama dalam masyarakat Indonesia yang plural perlu dibuat satu catatan kritis. Kendati menamakan dirinya demokratis, negara melalui pendefinisian “agama-agama resmi” tidak memberi ruang pada berbagai aliran kepercayaan yang telah ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Negara ikut mengurus hal-hal yang khas agama dan dalam prakteknya melanggengkan penindasan dan intoleransi terhadap berbagai kelompok kepercayaan baik dalam agama Islam, Kristen maupun agama-agama suku (lokal).

Menanggapi keprihatinan di atas, maka konsep kebebasan beragama perlu direnungkan lebih lanjut di negeri ini. Konsep kebebasan beragama seperti diajarkan Gereja Katolik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966), yang telah diratifikasi Indonesia 2005, menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk menata relasinya dengan agama-agama.¹²

3. Katolisisme dan Sumbangan Publiknya Dalam Pluralitas Indonesia

Pengalaman penjajahan telah membuat kalangan Katolik ikut terpenggil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kendati ada sinisme dan keraguan dari kalangan tertentu terhadap komitmen orang Katolik terhadap nasib dan masa depan bangsa,¹³ namun sejarah telah memperlihatkan bahwa sejak awal mula kemerdekaan, orang-orang Katolik ikut berjuang dengan menyumbang pahlawan-pahlawan bangsa.¹⁴

11 Moh Mahfud MD., “Menolak Ide Khilafah,” *Kompas* (26 Mei 2017), hal., 6.

12 Paulinus Yan Olla, *Spiritualitas Politik*, hal., 124; juga Anas Saidi (ed.), *Menekuk Agama*, hal., 14-17.

13 Mikhael Dua, Febriana R. Kaimana, Kasdin Sihotang (eds.), *Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama* (Jakarta: Obor, 2008), hal., 2.

14 Sederet nama sejak awal kemerdekaan bisa disebutkan antara lain: Laksana Muda Yosafat Soedarso, Laksamana Muda Agustinus Hadisoetjipto, Kolonel Ignatius Slamet Riyadi, Mgr. Soegijapranata atau di zaman Indonesia merdeka, I. J. Kasimo.

Dalam konteks perjuangan tersebut ucapan yang boleh dikategorikan sebagai profetis dari Mgr. Soegijapranata SJ, “menjadi seratus persen Katolik dan seratus persen Indonesia,” terus-menerus bisa menjadi panduan bagi keterlibatan orang Katolik di ruang publik. Jika dikaitkan dengan proses menemukan identitas, maka pernyataan di atas telah menuntun banyak orang Katolik Indonesia untuk menemukan diri sebagai orang kristiani sekaligus orang Indonesia dan tidak perlu merasa diri “orang asing” di negeri sendiri.

Memang dalam Katolisisme tingkat mondial ditengarai adanya keengganan orang-orang Katolik untuk terlibat dalam dunia politik. Politik di banyak kalangan telah dipersepsikan begitu negatif, penuh intrik dan sering disetarakan dengan kehidupan yang tidak jujur. Di Italia misalnya ada kecenderungan bahwa orang-orang Katolik lebih memilih melibatkan diri dalam gerakan-gerakan *voluntariat* (sukarelawan) karena dianggap merupakan perwujudan lebih nyata karitas kristiani.¹⁵

Doktrin Katolik justru mendorong ke arah keterlibatan politik. Pentingnya seorang Katolik untuk terlibat dalam politik (baca: di ruang publik) kendati jumlahnya secara kuantitatif minoritas antara lain karena alasan-alasan berikut. Pertama, Manusia mau tidak mau harus hidup dalam suatu masyarakat politik. Partisipasi dalam dunia politik penting karena menjadi medium ekspresi diri. Melalui politik orang kristiani dapat memperjuangkan nilai-nilai yang dipandang penting demi kemanusiaan.

Kedua, melalui keterlibatan politik, berbagai kebijakan publik berkaitan dengan kemanusiaan ditetapkan. Ia bisa berwujud keputusan publik, hukum atau undang-undang yang berperan penting baik bagi individu maupun kelompok. Melalui politik, warga negara mendapat peluang untuk ikut mempengaruhi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan ideal-ideal yang diharapkannya. Bersikap acuh terhadap politik berarti membiarkan diri ditentukan secara sepihak oleh orang lain.

15 Giuseppe Savagnone, *I Cattolici nella politica oggi* (Assisi: Cittadella Editrice, 2012), hal., 17-19.

Ketiga, Gereja sebagai lembaga tidak dapat mengisolasi diri dari negara. Kendati mempunyai tujuan rohani yang melampaui tujuan temporal negara, Gereja tetap berada dalam negara. Apa yang dilakukan Gereja mempunyai pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung pada bangsa dan negara. Begitu pula apa yang dilakukan negara mempunyai dampak pula kepada Gereja.¹⁶

Keterlibatan Gereja Katolik dalam politik tidak dilakukan secara langsung sebagai sebuah keterlibatan lembaga agama dalam suatu afiliasi politik. Misi Gereja adalah suatu misi rohani dan menjadi sumber kekuatan moral yang mengatasi berbagai bentuk ideologi sebagaimana diusung oleh negara. Gereja mempercayakan keterlibatan dalam politik/ruang publik sebagai bidang khas kaum awam. Kaum awam dipanggil menjalin kesucian hidup Kristiani melalui keterlibatannya untuk mempersembahkan dan menyucikan dunia.¹⁷

Kiblat keterlibatan Gereja Katolik dalam skala mondial mengalami perkembangan dari masa ke masa. Selama sekitar 1500 tahun, para Paus menjadi pengawas agama yang mengontrol pelaksanaan politik. Refleksi teologis pun disodorkan dalam rangka moralisasi dan spiritualisasi politik. Maksudnya, para raja, pangeran dan pejabat publik diarahkan sedemikian rupa sehingga keputusan-keputusan politiknya memihak kepentingan Gereja dan Kristianitas secara umum.¹⁸

Sejak Vatikan II relasi itu berubah. Pada masa-masa sebelumnya keterlibatan Gereja lebih terarah pada usaha membela kepentingannya, kini Gereja mengarahkan pandangannya pada manusia dan kebutuhannya sebagai pusat perhatian dalam berpolitik. Mengikuti ajaran Vatikan II, Gereja Indonesia pun melibatkan diri dalam politik dalam artinya yang luas (tidak melulu soal perebutan kekuasaan), untuk membangun kesejahteraan manusia. Kesejahteraan umum yang diusung orang-orang katolik di ruang publik “mencakup seluruh kondisi-kondisi kehidupan sosial yang memungkinkan

16 Mikhael Dua, Febriana R. Kaimana, Kasdin Sihotang (eds.), *Politik Katolik*, hal., 5-7.

17 Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*, No. 34.

18 Lihat, Paulinus Yan Olla, *Spiritualitas Politik*, hal., 100.

orang-orang, keluarga dan kelompok-kelompok mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan lebih mudah.”¹⁹

Dalam alam politik Indonesia yang secara konstitusional mengusung ide ketuhanan dalam dasar negaranya, agama-agama, termasuk Kristianitas perlu mengontrol dirinya agar tidak dengan mudah membaurkan urusan keagamaan dan politik dalam perspektif sektarian. Para pemimpin agama dihimbau agar: (1) menjamin integritas diri sebagai panutan bukan karena mewacanakannya, tetapi karena pantulan keteladanan ditangkap oleh/ dalam nurani masyarakat; (2) berhenti menjadi pelaku perebutan kekuasaan atau “berselingkuh” dengan kekuasaan; (3) mampu menjamin bahwa teks-teks sakral dan simbol-simbol keagamaannya tak dijadikan para “petarung kekuasaan” atau negara dan institusi-institusi publik sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan dan tindakan-tindakan politik mereka.²⁰

Apa pun medium keterlibatan politik, meskipun tidak ada Partai Katolik di Indonesia, seorang Katolik tidak bisa menjadi apatis atau alergi terhadap politik. Mengikuti doktrin Gereja yang berkembang dari zaman ke zaman, perjuangan orang Katolik di ruang publik merupakan ekspresi dari imannya. Keterlibatan sosial merupakan panggilan bagi setiap orang Katolik untuk mewujudkan kebaikan bersama/kepentingan umum.²¹

Penutup

Agama dalam masyarakat yang semakin ditandai pluralisme multi-dimensional, secara umum ditantang untuk memperlihatkan relevansi sosial-politisnya bagi kehidupan publik. Gereja Katolik yang hadir dalam negara yang mempunyai kekayaan etnis, kultural, multireligius dan iman

19 Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, *Gaudium et Spes*, no. 74.

20 Lihat, Paulinus Yan Olla, “Pemimpin Agama dan Nurani Bangsa,” *Kompas* (28 Februari 2017), hal., 6

21 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della dottrina della chiesa* (Citta del Vaticano: Editrice Vaticana, 2005), no.164, hal., 89.

kepercayaan seperti Indonesia pun dihadapkan pada tantangan untuk terlibat secara sosial-politik dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Gereja di Indonesia dipanggil antara lain untuk ikut menciptakan ruang publik yang mengakui adanya keberagaman. Katolisitas yang menjadi ciri Gereja seharusnya terus mengingatkan Gereja akan panggilannya merajut persahabatan universal yang lintas etnis, budaya dan keagamaan. Seperti dicatat filsuf J. Habermas, “penyalahgunaan secara politis fundamentalisme agama baik di Barat maupun di Timur tetaplah sesuatu yang mengerikan.”²² Maka inisiatif mencegah agama memonopoli tafsiran atas kehidupan bersama menjadi pula panggilan keterlibatan sosial Gereja.

Dalam konteks di atas, Gereja Katolik hendaknya berdiri di garda depan untuk mendorong penghargaan terhadap kebinekaan. Seperti disinggung dalam Seminar oleh profesor Herawati pada awal tulisan ini, dari sisi genetik ada percampuran/pembauran begitu kompleks sehingga tidak ada orang Indonesia asli yang berhak mengklaim paling pribumi. Fanatisme keagamaan yang dirajut kebijakan politis yang hanya mengakui “agama-agama resmi” dan mengeksklusikan kepercayaan-kepercayaan lokal harus dilampaui. Jauh sebelum “agama-agama resmi” itu masuk ke Indonesia, kepercayaan-kepercayaan lokal telah ribuan tahun berkembang di Bumi Nusantara.²³

Hari-hari ini ketika ruang publik di Tanah Air begitu gaduh oleh pengusungan agama di ruang publik, orang Katolik yang secara kuantitatif sangat kecil diharapkan masuk terlibat langsung dalam dunia politik untuk ikut memberikan sumbangan. Sumbangan terbesar yang dapat diberikan oleh orang-orang awam Katolik dan Gereja secara keseluruhan bagi politik adalah ikut menjernihkan “patologi-patologi” agama seperti disinggung Paus emeritus Benediktus XVI. Agama-agama yang sering memiliki klaim yang keliru atas universalitas dan karena itu memicu intoleransi dan teror perlu dituntun oleh akal budi dan dibatasi wewenangnyanya.

22 Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (eds.), *Dialektika Sekularisasi*, hal., 73.

23 Ahmat Arif, “Mengenal Diri, Menghargai Kebinekaan,” hal., 5.

Akhirnya di ruang publik yakni dalam bidang kebijakan politis, negara pun perlu menghindarkan diri dari godaan melakukan intervensi terlalu jauh ke dalam wilayah-wilayah agama. Maka diperlukan rekonstruksi hubungan agama dan negara terutama di tingkat kebijakan dan implikasinya. Pemerintah dan para pemuka agama-agama perlu bekerja sama agar di satu pihak tidak meminggirkan agama dari ruang publik tetapi di pihak lain tidak juga menggiring agama untuk dijadikan tunggangan politik kekuasaan.



KEPUSTAKAAN

- Arif, A., “Mengenal Diri, Menghargai Kebinekaan,” dalam *Kompas* (16 Juli 2017), hal. 5.
- Dua, M., Kaimana, Febriana R., Sihotang, K. (eds.). *Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama*. Jakarta: Obor, 2008.
- Halili, “Mengobati Luka Demokrasi,” *Kompas*, (20 Mei 2017), hal. 7.
- Kleden, Paul B. dan Sunarko, A. (eds.). *Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan*. Penerbit Lamalera dan Penerbit Ledalero, 2010.
- Mahfud MD.M., “Menolak Ide Khilafah,” *Kompas* (26 Mei 2017), hal. 6.
- Olla, Paulinus Yan. *Spiritualitas Politik, Kesucian Politik Dalam Perspektif Kristiani*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- . “Pemimpin Agama dan Nurani Bangsa,” *Kompas* (28 Februari 2017), hal., 6
- Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. *Compendio della dottrina della chiesa*. Citta del Vaticano: Editrice Vaticana, 2005.
- Saidi, A. (ed.). *Menekuk Agama, Membangun Tahta*. Jakarta: Desantara Utama, 2004.
- Savagnone, G. *I Cattolici nella politica oggi*. Assisi: Cittadella Editrice, 2012.